

KENAIKAN HARGA KEDELAI

Ancam Karyawan Tahu Kehilangan Pekerjaan



KR-Agussutata

Tenaga kerja memproses pembuatan tempe di tengah kenaikan harga kedelai.

WATES (KR) - Kenaikan harga kedelai menjadi ancaman bagi karyawan pembuat tempe dan tahu kehilangan pekerjaan. Perajin makanan mengandalkan bahan baku kedelai tidak memiliki keuntungan untuk menggaji karyawan.

Perajin tempe maupun tahu mampu bertahan di tengah kenaikan harga kedelai mencapai sekitar Rp 9.200 perkilogram (kg) disebabkan tidak memperhitungkan biaya operasional tenaga kerja. Perajin memproses pembuatannya, biasanya dalam jumlah kecil disesuaikan dengan kemampuan perajin.

Perajin beranggapan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan sebagai keuntungan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. "Jika menggunakan karyawan, tidak dapat melangsungkan usaha pembuatan tahu," ujar Siti Hasanah, salah satu perajin tahu di Bujidan, Kalurahan

Tawang Sari, Kapanewon Pengasih, Senin (4/1).

Menurutnya, perajin tidak mampu menaikkan harga tahu, disesuaikan dengan harga bahan baku kedelai. Di pasaran terjadi persaingan harga tidak sehat. Jika menaikkan harga, konsumen akan berpindah ke pedagang lain yang harga tahu lebih murah.

Ketua Kelompok Perajin Tahu 'Sido Lurah' Bujidan, Hibun mengatakan dalam keadaan normal harga kedelai ada di kisaran Rp 6.800 sampai Rp 7.000 per kg. Tiga bulan terakhir terus mengalami kenaikan hingga harga terakhir mencapai Rp 9.200 per kg.

Menurutnya, sebagian besar anggotanya mampu bertahan menghadapi kenaikan harga kedelai. Memproduksi tahu dalam jumlah kecil disesuaikan dengan kemampuan tenaga perajin. **(Ras)-d**

Kedelai Naik, Pengusaha Tempe Kurangi Produksi

WONOSARI (KR) - Sejumlah pengusaha tempe di Gunungkidul memilih untuk mengurangi jumlah produksi karena harga bahan baku naik. Harga kedelai impor naik di awal tahun 2021. Jika sebelumnya harganya Rp 6.700/kg kini menjadi Rp 9.200/kg-nya. Sehingga pengusaha tempe di Gunungkidul mengurangi produksi. Karena kenaikan harga bahan baku ini memberatkan produsen.

"Harga sebelumnya Rp 6.700, namun awal tahun ini mengalami kenaikan menjadi Rp 9.200," kata Mustofa salah satu produsen tempe di Siraman, Kapanewon Wonosari, Senin (4/1).

Meskipun terdampak bahan baku naik, Mustofa tetap menjalankan usaha yang digelutinya sejak 2002 ini. Menurutnya penggunaan bahan kedelai



KR-Dedy EW

Pengusaha tempe di Wonosari

impor hasilnya lebih maksimal. Karena itu masih menggunakan kedelai impor dibandingkan lokal.

"Memang sejak awal selalu menggunakan kedelai impor. Walaupun harganya kini naik, tetap menggunakan kedelai impor dengan diikuti mengurangi produksi. Biasanya memproduksi 1,5 kuintal kini menjadi 1 kuintal perharinya," imbuhnya.

Terpisah Kabid Kabid Perdagangan, Dinas Per-

industrian dan Perdagangan (Disperindag) Gunungkidul Yuniarti Ekoningsih menuturkan, kenaikan kedelai impor memang sudah dirasakan sejak akhir Desember 2020. Kenaikan ini juga berdampak pada naiknya harga tempe di pasar. Kebijakan impor ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Daerah tidak bisa berbuat banyak, hanya melakukan pemantauan dan melaporkan ke DIY. **(Ded)-d**

Turun, Angka Lakalantas di Kulonprogo

WATES (KR) - Angka kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) di wilayah kabupaten Kulonprogo selama 2020 mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya. Data yang tercatat di Satlantas Polres Kulonprogo, jumlah lakalantas turun sebanyak 56 kejadian atau 8,75 persen.

Kapolres Kulonprogo, AKBP Tartono didampingi Wakapolres Kopol Sudarmawan, Kamis (31/12) menyampaikan, jumlah lakalantas pada 2020 menurun dibanding tahun sebelumnya. Pada 2019 tercatat sebanyak 640 kejadian dengan korban meninggal dunia (MD) 61 orang, luka berat 6 orang, luka ringan 1.060 orang dengan kerugian materiil Rp 186.300.000. Sedangkan pada 2020 menurun, sebanyak 584 kejadian dengan

korban MD 36 orang, luka berat 1 orang, luka ringan 905 orang dengan kerugian materiil Rp 105.000.000.

Sementara jumlah pelanggaran lalu lintas pada 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, sebanyak 11.497 pelanggaran atau 49,94 persen. Pada 2019 terdapat 23.020 pelanggaran dan denda tilang Rp 973.264.000. Sedangkan di 2020 sebanyak 11.523 pelanggaran dan denda tilang Rp 397.860.000.

"Angka lakalantas turun karena Satlantas Polres Kulonprogo selalu memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap berada di rumah dalam situasi pandemi Covid-19, sehingga pergerakan kendaraan baik roda dua maupun roda empat lebih selektif," jelasnya. **(M-4)-d**

APB Kalurahan Selesai 100 Persen

PENGASIH (KR) -Delapan puluh tujuh Kalurahan atau seratus persen kalurahan di Kabupaten Kulonprogo sudah menyelesaikan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) 2021 pada Desember 2020.

"Penyusunan APBKal 2021 ini melalui proses panjang, dari penggalian lewat musyawarah pedukuhan Maret-April 2020, Muskal dan Musrenbangkal, serta penetapan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) tahun 2021 di bulan September, hingga penyusunan dan penetapan APBKal 2021 pada Desember 2020," ungkap Sudarmanto SIP MSI Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMD Daldud dan KB), Senin (4/1).

Menurut Sudarmanto, capaian seratus persen penyusunan APBKal 2021 ini sejalan dengan amanat dan visi Bupati Kulonprogo. "Diharapkan prestasi ini dapat dipertahankan di tahun-tahun selanjutnya dan dapat berdampak positif dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang pada akhirnya masyarakat bisa merasakan manfaat dari pembangunan desa," ucapnya.

APBKal yang sudah ditetapkan pada akhir tahun 2020, lanjut Sudarmanto, maka akan membawa banyak keuntungan dan kemudahan bagi desa di awal tahun 2021. Khususnya dalam melaksanakan pembangunan desa. Sebab, begitu masuk tahun anggaran baru maka bisa langsung melaksanakan program yang sudah dituangkan dalam APBKal tersebut.

"Berbeda dengan APBKal tahun sebelumnya, untuk APBKal 2021 menggunakan sistem online. Kalurahan harus melakukan entri dan posting APBKal maksimal tanggal 4 Januari, kemudian Siskeudes akan direset sehingga Kalurahan sudah tidak dapat mengentri dan mengedit. Hal tersebut membuat kalurahan menyetujui APBKal tepat waktu," pungkasnya. **(Wid)-d**

RENCANA PEMBELAJARAN TATAP MUKA

Kemenag Daring, DPRD Batalan 'Tryout'

WONOSARI (KR) - Sejumlah sekolah di Gunungkidul batal mengadakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan keputusan rapat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul yang semula akan dimulai pada Senin (4/1).

Pembatalan ini terpaksa dilakukan lantaran sejumlah sekolah masih bingung dan wajib melakukan koordinasi dengan Satgas Penanggulangan Covid-19 di masing-masing kapanewon dan kalurahan. Sementara di tengah melonjaknya kasus penyebaran Covid-19, DPRD Gunungkidul membatalkan rencana *tryout* sejumlah SD di Kapanewon Playen. Sementara itu untuk Kepala Kantor

Kementerian Agama (Kemendikbud) Gunungkidul masih melakukan pendidikan secara daring.

"Pembatalan ini kita lakukan karena pergerakan dan penyebaran Covid-19 masih terjadi dan berpotensi menimbulkan penularan," kata Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Hery Nugroho SS, Senin (4/1).

Hingga rencana pembelajaran tatap muka dimulainya Senin (4/1), tidak sa-

tupun sekolah terutama jenjang pendidikan SD memulai KBM.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disdikpora Gunungkidul Ely Praptono mengatakan, intinya sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka pihak sekolah hendaknya berkoordinasi dahulu dengan Satgas Penanganan Covid-19.

Sementara itu, Kepala Bidang SMP Disdikpora Gunungkidul, Kisworo

menambahkan, dari dinas sebetulnya lebih melonggarkan mengenai pelaksanaan KBM tatap muka di sekolah. Pihaknya menyerahkan kebijakan pembelajaran tatap muka di masing-masing sekolah dan tim Satgas di tingkat kapanewon.

Sedangkan Kepala Kemendikbud Gunungkidul H Arif Gunadi MPdI memastikan untuk kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan secara dalam jaringan (daring). "Pelaksanaan daring ini untuk mencegah jaman sampai muncul kluster baru di dunia pendidikan," imbuhnya. **(Bmp/Ded/Ewi)-d**

PERAJIN TAHU-TEMPE LAKUKAN PENYESUAIAN

Tak Ada Aksi Mogok Produksi

WONOSARI (KR) - Isu mogok produksi tempe tahu di Kabupaten Gunungkidul tidak terjadi dan pemilik usaha industri lebih memilih kebijakan penyesuaian. Karena meskipun kenaikan harga bahan pokok kedelai tidak signifikan, tetapi kenaikan harga tersebut tetap berpengaruh pada produksi pangan berbasis kedelai seperti tahu dan tempe.

Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Gunungkidul Virgilio Soriano mengatakan sempat ada informasi jika para perajin tahu-tempe akan melakukan mogok produksi. "Untuk wilayah Gunungkidul pemogokan produksi selama dua hari tidak terjadi," katanya, Senin (4/1).

Terkait dengan isu tersebut Disperindag Gunungkidul telah melaku-

kukan kroscek dan memastikan bahwa belum banyak perajin yang melaporkan adanya keluhan akibat terdampak kenaikan harga kedelai. Rata-rata perajin memahami situasi yang ada mengingat produksi tahu-tempe memang sangat tergantung pada kedelai impor.

Untuk mengatasi tingginya harga kedelai produsen memilih kebijakan penyesuaian dengan mengurangi ukuran dari kondisi harga kedelai normal. Terkait dengan kenaikan harga tersebut pihaknya sudah berkomunikasi dengan Pemerintah DIY sebab kewenangan mengenai distribusi kedelai impor adalah kewenangan provinsi. "Kami berharap pemerintah pusat bisa segera mengeluarkan solusi agar kenaikan harga kedelai impor bisa dikendalikan," imbuhnya.

Kabid Perdagangan Disperindag Gunungkidul Yuniarti Ekoningsih menambahkan harga kedelai impor saat ini berada di kisaran Rp 9 ribu per kilogram. Kenaikan ini terutama dirasakan sejak akhir tahun 2020. Sebab di awal Desember, harga kedelai impor masih di kisaran Rp 8.500 perkilogramnya. Dari kondisi harga lapangan berarti sejak awal Desember hingga saat ini terdapat kenaikan sebesar Rp 500. Dengan kenaikan ini produsen memilih untuk melakukan penyesuaian sehingga di tingkat pasar tidak terjadi kelangkaan akibat mereka melakukan mogok produksi. "Kita berharap pemerintah segera memberikan solusi agar ada penstabilan harga kedelai," terangnya. **(Bmp)-d**

BUPATI SERAHKAN 357 SURAT KEPUTUSAN

CPNS Hilangkan Kebiasaan Buruk

WATES (KR) - Bupati Kulonprogo, Drs Sutedjo mengingatkan para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus betul-betul bisa menjaga sikap selama menjalani pelatihan untuk diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setiap CPNS dituntut mampu menghilangkan kebiasaan buruk pada masa lalu. Salah satunya bangun siang, mulai saat ini mereka harus bangun pagi karena jam masuk kerja pukul 07.30 WIB.

"Dengan jadi CPNS, Anda telah terikat berbagai macam aturan. Teori sosiologi, setiap perubahan status harus diikuti perubahan sikap. Setelah menyandang status CPNS, sikap Anda harus betul-betul diperhatikan," tegas bupati di usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS di lingkungan Pemkab Kulonprogo, di Ruang Adikarto, Senin (4/1).

Lebih lanjut Bupati Sutedjo mengatakan, status PNS adalah *priyayi* juga

perlu dihilangkan. Karena PNS bukan kalangan *priyayi* yang selalu dilayani, melainkan sebaliknya. PNS adalah abdi negara yang bertugas melayani masyarakat. "Kasarannya kita itu *batut* atau pembantunya masyarakat, jadi pelayanan kepada masyarakat yang diutamakan," katanya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) setempat, Dra Yurianti mengatakan penyerahan 357 SK CPNS sudah sesuai prosedur yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Para penerima SK sebelumnya telah menjalani seleksi CPNS mulai dari pemberkasan, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Dari total 4.809 pendaftar, yang lulus formasi 2029 di Kulonprogo 357 orang.

"Sebanyak 357 CPNS tersebut sudah kami usulkan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya ke BKN dan seluruh usul NIP telah dis-



KR-Asrul Sani

Bupati Drs H Sutedjo menyerahkan SK CPNS secara simbolis disaksikan Wabup Fajar Gegana (belakang).

etujui BKN sehingga tahapan selanjutnya menerbitkan surat keputusan bupati tentang Pengangkatan CPNS," ujarnya menambahkan setelah menerima SK, para CPNS bisa langsung bekerja di instansinya masing-masing.

"Tentang gaji besarnya masih 80 persen dari total gaji. Meski telah mendapat SK para CPNS belum secara resmi jadi PNS, nanti masih ada pelatihan dasar. Usai pelatihan, mereka akan dinilai dan hasilnya

jadi pertimbangan apakah CPNS layak diangkat sebagai PNS atau tidak. Sesuai ketentuan paling lama satu tahun setelah pelatihan para CPNS sudah bisa diangkat. Mudah-mudahan semua bisa lulus," ungkapnya sambil menambahkan ke-357 CPNS tersebut akan mengisi posisi di empat kelompok jabatan, yakni guru tenaga kesehatan, tenaga fungsional nonguru dan nonkesehatan serta jabatan fungsional umum. **(Rul)-d**

7 PERSONEL TERIMA PANGKAT PENGABDIAN

167 Anggota Polres Gunungkidul Naik Pangkat

WONOSARI (KR) - Sebanyak 167 anggota Polres Gunungkidul dari berbagai fungsi menerima Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat. Penyerahan surat keputusan kenaikan pangkat dilakukan Kapolres AKBP Agus Setiawan SIK di Halaman Mapolres Gunungkidul disaksikan Wakapolres, para Kabag, Ka-

sat, perwira staf dan Kapolsek Se-Gunungkidul. "Dengan kenaikan pangkat tersebut diharapkan memotivasi anggota dalam meningkatkan kinerja maupun pelayanan kepada masyarakat," kata Kapolres AKBP Agus Setiawan SIK, Senin (4/1) kemarin.

Mereka yang naik pangkat tersebut meliputi ang-

gota berpangkat perwira, bintang maupun tamtama dan pegawai sipil berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 1 orang. Sebelum mereka naik pangkat beberapa anggota lebih dulu mengikuti program pembinaan karier polisi. Diingatkan bahwa kenaikan pangkat bukan merupakan hadiah, tetapi merupakan bentuk penghargaan karena telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Karena itu dengan menyandang pangkat baru tentu memiliki konsekuensi agar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya.

"Ini merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan sehingga dalam menjalankan tugas dapat diharapkan sebagaimana diharapkan dan mampu memegang etos kerja ke-

polisian," imbuhnya.

Ke-167 anggota yang naik pangkat pengabdian yakni dari anggota berpangkat Kopol ke AKBP 2 orang, pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) ke Komisaris Polisi (Kopol) : 1 personel, Inspektur Polisi Satu (Iptu) ke AKP 2 personel, Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) ke Inspektur Polisi Dua (Ipd) 2 Personel, pangkat Iptu ke AKP 12 personel, Ipd ke Iptu 22, Aipda ke Aiptu 20, Bripta ke Aipda 32 personel, Brigadir ke Bripta 34 personel, Briptu ke Brigadir 4 personel, Bripta ke Briptu 34 personel, Bharatu ke Bharaka 1 personel dan PNS sebanyak 1 personel. Dalam acara tersebut Kapolres juga memberikan penghargaan kepada 14 anggota Polri berprestasi. **(Bmp)-d**



KR-Bambang Purwanto

Upacara kenaikan pangkat anggota Polres Gunungkidul.